

DAFTAR PUSTAKA

- BPK. (2024, April 22). Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Diakses dari <https://yogyakarta.bpk.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah-daerah-istimewa-yogyakarta-tahun-anggaran-2023-mendapat-opini-wajar-tanpa-pengecualian/>
- BPK. (2025, April 24). BPK Kembali Berikan WTP pada Pemda D.I. Yogyakarta. Diakses dari <https://yogyakarta.bpk.go.id/bpk-kembali-berikan-wtp-pada-pemda-d-i-yogyakarta/>
- DPRD. (2024, April 24). DIY Kembali Raih WTP Ke-14, DIY Perlu Tindak Lanjuti Beberapa Rekomendasi. Diakses dari <https://www.dprd-diy.go.id/diy-kembali-raih-wtp-ke-14-diy-perlu-tindak-lanjuti-beberapa-rekomendasi/>
- Gazali, M., Islamy, S. L., & Rasmuin. (2024). Fungsi Pengawasan Internal Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(02), 168-180.
- Herubawa, D. A., & Ali, S. (2019, Februari 1). Evaluasi Peran Pemberian Konsultasi Inspektorat Daerah: Studi Kasus Pada Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 13-30.
- Hidayah, K., Wismono, F. H., Kusumaningrum, M., & Amarullah, R. (2019, Agustus 2019). Peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2), 221-236.
- Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021. Yogyakarta.
- Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022. Yogyakarta.
- Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Yogyakarta.
- Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023. Yogyakarta.

- Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024. Yogyakarta.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Rawamangun: Prenadamedia Group.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Menteri Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Pramana, A. C., Eferyn, K., Yap, N., Karlia, L., & Siswandari, L. (2024). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Dalam Mempertahankan Opini WTP. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 7564-7570.
- Rahmawati, K. (2014). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyanto, A. (2016). *Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.